



**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI
SEKITAR HUTAN PELANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*The Effectiveness Of The Forest And Land Rehabilitation Program (Rhl) In
Increasing The Economy Of Communities Around Pelangan Forest Lombok
Barat District*

Chantika Dewi¹, Baiq Rizka Milania Ulfah²

^{1,2}**Universitas Islam Al – Azhar Mataram**

Email: rizkabaiq@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Forest and Land Rehabilitation (RHL) program in improving the economy of the community around the Pelangan forest. The data collection method used in this research is observation, interview, and literature study. The results of this study indicate that: the RHL program is effective in improving the economy of the community around the Pelangan forest, this can be seen from the absorption of labor both as laborers and as members of forest management farmer groups, where laborers earn wages for forest management, while farmer groups earn forest management products in the form of plantation products that can be sold and obtain plant seeds assistance

Keywords: *RHL Program, Effectiveness and the community's economy*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan Pelangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Studi Literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : program RHL efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan Pelangan hal tersebut dilihat dari penyerapan tenaga kerja baik sebagai buruh kerja maupun sebagai anggota kelompok tani pengelolaan hutan, dimana para buruh kerja memperoleh upah atas pengelolaan hutan, sedangkan kelompok tani memperoleh hasil pengelolaan hutan berupa hasil perkebunan yang dapat dijual dan memperoleh bantuan bibit tanaman.

Kata kunci : *Program RHL, Efektifitas dan perekonomian masyarakat.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia, penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sifat hutan yang khas dengan keanekaragaman komponen penyusunnya, memiliki keragaman peluang pemanfaatan untuk kepentingan antar generasi dengan siklus usaha yang panjang, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.

Pengelolaan hutan di Indonesia meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan hutan agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan secara simultan, sebagai pendukung dalam

pembangunan ekonomi melalui produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, perlindungan wilayah melalui konservasi tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati guna kepentingan jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang. Berikut merupakan data hutan di Indonesia :

Tabel 1.1 Data Hutan di Indonesia

No	Tahun	Luas Hutan di Indonesia
1.	1985-1997	1,8 juta Ha/tahun
2.	1997-2000	2,8 juta Ha/tahun
3.	2000-2005	1,08 juta Ha/tahun

Sumber :RPHJP KPHP Unit II Pelangan

Berdasarkan data pada table 1.1 diatas diketahui bahwa laju deforestasi hutan 1985 - 1997 adalah seluas 1,8 juta ha/tahun, kemudian meningkat pada periode 1997 - 2000 menjadi 2,8 juta ha/tahun, yang dan menurun lagi pada periode 2000 - 2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun. Penyebab terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi atau penebangan hutan. Alasan utama kegiatan deforestasi hutan adalah pembukaan lahan untuk area industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian atau pemukiman bagi warga akibat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat dan pergeseran pemukiman ke area pedesaan. Metode yang umum digunakan dalam kegiatan deforestasi yaitu dengan membakar hutan atau menebang pohon-pohonnya secara liar dan tanpa pandang bulu. Praktek tersebut mengakibatkan tanah menjadi tandus dan sulit menahan cadangan air, lalu menimbulkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi hutan yang kritis tersebut di atas, akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan umat manusia dan lingkungannya dengan meningkatnya frekuensi banjir dan tanah longsor, pemanasan global, serta perubahan iklim yang sulit diprediksi. Upaya-upaya pembangunan terus dilakukan untuk menekan laju kerusakan hutan tersebut, hingga kondisi hutan dapat berfungsi secara optimal. Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat telah diluncurkan dengan harapan akan terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mengakomodasikan tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

Strategi Pemerintah Indonesia untuk melestarikan hutan dan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah program upaya-upaya pemulihan, dan peningkatan fungsi lahan dan hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap berjalan. Program RHL merupakan program yang berada dibawah naungan kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Salah satu KPH yang ada di Indonesia adalah KPH Produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan salah satunya adalah KPHP Pelangan yang ada di Kabupaten Lombok barat yang mempunyai Luas wilayah kelola KPHP Pelangan adalah seluas 17.636,15 Ha, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2841/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) seluas 19.050 (Sembilan Belas Ribu Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah Prov.NTB, adapun data terkait luas wilayah KPHP. tersaji dalam **Tabel.1.2** berikut

Tabel.1.2 Luas Wilayah KPHP Unit II Pelangan berdasarkan Kelompok & Fungsi Hutan.

No	Kelompok Hutan	RTK	SK Penetapan	LUAS (Ha)			TOTAL
				HL	HP	HPT	
1	Gunung Sasak	3	SK. 3001/Menhut-VII/KUH/2014	492.00	-	-	492.00
2	Pelangan	7	SK. 4605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017	6,191.90	131.00	9,479.00	15,801.90
3	Marejebonga	13	SK. 3100/Menhut-VII/KUH/2014	1,045.08	297.17	-	1,342.25
JUMLAH				7,728.98	428.17	9,479.00	17,636.15

Sumber : RPHJP KPHP Unit II Pelangan 2020

Dengan luas wilayah sebanyak itu Pemerintah memberikan izin Pemanfaatan hutan di wilayah KPHP Pelangan Provinsi NTB kepada masyarakat sekitar Hutan untuk memanfaatkan dan memberikan memperbaiki perekonomian dan melestarikan hutan yang ada di wilayah sekitar KPHP Pelangan. Di wilayah KPHP Pelangan ada 3 kelompok hutan yaitu Kelompok Hutan Gunung Sasak (RTK. 3) sesuai dengan SK.3001/Menhut-VII/KUH/2014 mempunyai luasan wilayah Hutan Lindung 492.00 Ha, Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) sesuai dengan SK.4605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 mempunyai luasan wilayah Hutan Lindung 6,191.90 Ha, Hutan Produksi 131.00 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas 9,479.00 Ha. Kelompok Hutan MarejeBonga (RTK.13) sesuai dengan SK.3100/Menhut-VII/KUH/2014 mempunyai luasan wilayah Hutan Lindung 1,045.08 Ha dan Hutan Produksi 297.17 Ha. telah teridentifikasi beberapa bentuk perijinan di Kelompok hutan Produksi Pelangan. Perijinaan pemanfaatan hutan yang ada di KPHP Unit II Pelangan hampir seluruhnya berupa Persetujuan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan. Kondisi Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pelangan, Kelompok Hutan Gunung Sasak dan Kelompok Hutan Mareje Bonga yang menjadi areal kelola KPHP Unit II Pelangan memang sebagian besar kondisinya sudah rusak. Kondisi tersebut yang menyebabkan hutan yang ada di KPH Produksi Pelangan menjadi sangat rusak sehingga pemerintah memberikan izin pemanfaatan berusaha dan perizinan perhutanan sosial untuk memperbaiki fungsi hutan. adapun data izin pemanfaatan berusaha dan perizinan perhutanan sosial tersaji dalam table 1.3

Tabel.1.3: Data Perizinan Berusaha dan Perizinan Perhutanan Sosial di KPHP Unit II Pelangan

NO	KTH/Gapoktan /Koperasi /BumDes	SK IJIN/NKK/SPKS	Luas (Ha)	Jumlah Anggota	Skema HKm/KK/SPKS	Fungsi Hutan	Klas KUPS	Jenis Komoditas	Ket
1	Beriuq Pacu	Masih menunggu SK Kulin	100.00	66	Kemitraan Kehutanan	HPT	Silver		
2	Bina Bersama	Masih menunggu SK Kulin	100.00	120	Kemitraan Kehutanan	HPT	Silver		
3	Bonga Lestari	503/021/03/ II-JPHKm/ BKPMPT/2016	236.29	260	HKm	HL	Silver		
4	Wana Sasak Lestari	503/008/03/IUPHKm/BKPMPT/2016	48.27	133	HKm	HL	Silver		
5	Tempos Bersatu	503/006/03/1UPHKm/BKPMPT/2016	144.98	453	HKm	HL	Silver	Kemiri, Lebah Madu	
6	Buana Giri Buah Lilin	503/028/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	129.53	103	HKm	HL	Silver		
7	Batu Bao Lestari	503/027/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	172.65	144	HKm	HL	Silver		
8	Beryuk Pade Angen	503/024/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	213.54	219	H Km	HL	Silver		
9	Bun Beleng Lestari	503/022/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	236.62	154	HKm	HL	Silver		
10	Malek Mudi	503/020/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	122.21	77	H Km	HL	Silver		
11	Sinar Lestari	503/023/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	127.40	153	HKm	HL	Silver		
12	Bina Lestari	503/025/03/ IUPHKm/ BKPMPT/2016	89.92	90	HKm	HL	Gold		
13	Wana Karya	503/011/03/1UPHKm/BKPMPT/2016	44.21	151	HKm	HL	Gold	Kemiri, Lebah Madu	
14	Batu Gerdeng Lestari	503/009/03/1UPHKm/BKPMPT/2016	132.96	244	HKm	HL	Gold	Kemiri, Bambu	
15	Beriuq Tinjal	503/007/03/1UPHKm/BKPMPT/2016	50.48	81	HKm	HL	Gold	Kemiri, Lebah Madu	
16	Wahana Kawasan	503/010/03/1UPHKm/BKPMPT/2016	56.10	118	HKm	HL	Gold	Kemiri	
17	KTH Kedaro	SK No : 538/278/DISHUT/2014	412.12		HTR	HPT	Silver	Eucalyptus, Sengon	
18	KTH Tembawang	SK No : 538/278/DISHUT/2014	492.27		HTR	HPT	Silver	Sengon, Jati	

Sumber : Kabupaten Lombok Barat dalam angka 2020

Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa beberapa hal penyebab kerusakan hutan pelanggan adalah pengusahaan hutan pada masa lampau melalui pemberian Ijin HPH PT. Angka Wijaya Raya Timber, yang mengeksploitasi hasil hutan kayu, pendudukan dan okupasi lahan dalam bentuk perambahan hutan dan pertambangan bahan menieral tanpa ijin. Hal ini menyebabkan Izin HPH kepada perusahaan tersebut telah menyebabkan berbagai bentuk protes, ketidakadilan dan perlawanan masyarakat sehingga mendorong untuk diambil kebijakan melalui skema perhutanan sosial. Dengan adanya program RHL dapat membantu memperbaiki kerusakan hutan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wilayah KPH Produksi Pelangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam peneliti ini adalah Ketua Kelompok Tani (KTH) dan Masyarakat di sekitar hutan, sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Pelangan Tastura dan Kepala Desa di Desa Sekitar hutan. Metode Analisis Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330) dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Data menggunakan beberapa sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa Efektivitas Program RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan dapat dilihat sbb :

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai penggarap hutan (Penyerapan tenaga kerja).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa program RHL berdampak pada penyerapan tenaga kerja di kawasan hutan Pelangan Kab. Lombok Barat. Sebelum adanya program RHL, masyarakat di sekitar hutan banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga masyarakat tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan. Setelah adanya program Rehabilitasi Hutan Lindung, masyarakat sekitar hutan Pelangan diberdayakan sebagai penggarap hutan dan lahan baik sebagai anggota kelompok tani hutan dan buruh pekerja, dimana mereka akan memperoleh pendapatan atas pelaksanaan program tersebut.

Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan

Hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa adanya program RHL berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

1. Buruh Pekerja akan memperoleh pendapatan berupa upah dari KPH Pelangan atas pekerjaan yang dilakukan selama kegiatan program RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) berlangsung. Pendapatan yang didapatkan dimulai pada saat kegiatan pembuatan ajir, dimana sebelum mulai penanaman ketua kelompok tani akan menyiapkan ajir terlebih dahulu. Ketua kelompok akan memberikan tugas kepada buruh pekerja untuk pembuatan ajir. Setelah pembuatan ajir selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah penanaman bibit tanaman yang akan dilakukan saat bibit sudah berada dirumah ketua kelompok. Para buruh pekerja membawa bibit tersebut ke dalam kawasan hutan dan lahan dan barulah proses penanaman dilakukan. Setelah proses penanaman bibit selesai dilaksanakan para buruh pekerja akan diberikan upah sebesar Rp.900.000/Ha untuk satu orang buruh pekerja. Kemudian pada saat kegiatan perawatan tanaman yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun, para buruh pekerja akan dibayar sebesar Rp.250.000/Ha.
2. Kelompok Tani hutan akan memperoleh pendapatan yang sama dengan para buruh pekerja mulai dari kegiatan pembuatan ajir sampai dengan perawatan tanaman. Selain itu, kelompok tani juga akan diberikan bibit tanaman secara gratis berupa bibit buah – buahan dan kayu dari KPH Pelangan. Kemudian Pada saat musim panen, hasil panen yang diperoleh akan dibayarkan per kilogram sbb : untuk kemiri dibayar kan Rp.6.000-Rp.8.000/kg, untuk kayu putih Rp.500-Rp1.000/kg, untuk nilam Rp.1.500-Rp.2.000/kg, untuk Alpukat Rp.10.000/kg dan untuk lengkung Rp.10.000/kg sehingga semakin banyak hasil yang bisa dipanen semakin banyak juga pendapatan yang didapatkan oleh petani dan buruh pekerja.

Kendala pelaksanaan Program RHL

Kendala yang dihadapi para kelompok tani saat program RHL ini dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pemberian bibit tanaman yang kurang tepat sehingga beberapa tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan factor cuaca juga cukup berpengaruh dimana jika bibit diberikan diwaktu yang tidak tepat bisa membuat banyak bibit rusak dan dan mati sehingga sangat sulit untuk bisa ditanam dan bisa membuat kurang berhasilnya program RHL

nantinya. Selain itu program Monev yang dilaksanakan oleh KPH Pelangan hanya dilakukan setiap akhir tahun dan hanya sekali dalam setahun sehingga dirasa masih kurang dalam hal *monitoring* program.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah di paparkan di bab sebelumnya tentang Efektivitas Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Sekitar Hutan Pelangan Kabupaten Lombok Barat dapat diambil kesimpulan bahwa : Program RHL efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan Pelangan hal tersebut dilihat dari penyerapan tenaga kerja baik sebagai buruh kerja maupun sebagai anggota kelompok tani pengelolaan hutan, dimana para buruh kerja memperoleh upah atas pengelolaan hutan, sedangkan kelompok tani memperoleh hasil pengelolaan hutan berupa hasil perkebunan yang dapat dijual dan memperoleh bantuan bibit tanaman.

SARAN

1. Untuk KPH Perlu diadakannya program tambahan untuk meningkatkan kompetensi dan skill masyarakat sekitar hutan
2. KPH perlu mengadakan kegiatan Monev sebanyak 2 kali dalam setahun untuk memonitoring dan mengevaluasi berjalannya program RHL.

DAFTAR PUSTAKA

- (1945) UUD 1945 terutama pasal 33 tentang ekonomi kemasyarakatan
- (Ayudanti, 2017) Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat) Kiki Ayudanti 2017
- (Barat, 2020) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020, Badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat.
- (Budiani, 2007) Budiani, efektivitas program. 2007:20
- (Frida Mamuko, 2016) Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Frida Mamuko, H. Walangitan dan W. Tilaar (juni 2016)
- (Kettner, 2008) Kettner, Moroney dan Martin dalam bukunya *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach* (2008:262)
- (Mahmudi, 2016) Mahmudi. Manajemen Kinerja sektor publik. 2016, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- (Mardiasmo, 2017) Mardiasmo. Perpajakan. 2017, Yogyakarta: Andi.
- (Moleong, 2005) Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- (Pelangan, 2022) BKPH Pelangan, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
- (Pemerintah, 2020) Peraturan Pemerintah, Nomor 26 Tahun 2020, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
- (Prayitno, 1998) Prayitno, Hadi dan Budi Santoso, 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia



(Undang-undang, 1999) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan undang-undang No. 41 tahun 1999, kehutanan

(W.Gulo, 2002) W. Gulo, Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 116.

(Wira fitria, 2021) PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL: STUDI DI KPH PRODUKSI KERINCI, PROVINSI JAMBI DAN KPH LINDUNG SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Wira Fitria¹, Didik Suharjo², dan Sulistya Ekawati (November 2021)

(Zulkamain, 2021) Zulkarnain, Fahrizal, and Irma Dewi. . *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1 (2021): 70-81.

